AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i4.4251

KETIMPANGAN DISTRIBUSI KARTU INDONESIA PINTAR: SEBUAH KAJIAN TERHADAP AKSES DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Inequality in the Distribution of the Indonesia Smart Card: A Study on Access and Implementation in Indonesia

Putri Natalia Simanjuntak[1], Berlian Seladmai Yanti S[2], Michelle Simangunsong[3], Berlianti[4]
Universitas Sumatera Utara
putrinataliaa04@gmail.com; simatupangberlian11@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 1, 2024	Nov 15, 2024	Nov 27, 2024	Dec 3, 2024

Abstract

This study aims to examine the distribution inequality of the Indonesia Smart Card (KIP) Program as one of the Indonesian government's efforts to improve access to education for the poor and vulnerable poor. This program is expected to reduce school dropout rates and provide more equitable educational opportunities. However, its implementation still faces various obstacles, such as inaccurate targeting of recipients, delays in fund disbursement, lack of assistance, and the amount of assistance that is considered insufficient. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews, observation, and document analysis to explore the factors that influence the success and failure of KIP distribution in various parts of Indonesia. The results show that while the program provides short-term benefits in easing the economic burden of recipient families, its impact on improving long-term economic independence is limited. This study recommends improvements in the data collection mechanism, beneficiary verification, and more intensive mentoring to ensure program effectiveness. Thus, it is

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

expected that KIP can be more optimal in supporting education equity and poverty alleviation in Indonesia.

Keywords: Inequality, Distribution, Smart Indonesia Card, Implementation, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketimpangan distribusi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, kurangnya pendampingan, serta jumlah bantuan yang dinilai belum mencukupi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan distribusi KIP di berbagai wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan manfaat jangka pendek dalam meringankan beban ekonomi keluarga penerima, dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi jangka panjang masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam mekanisme pendataan, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan efektivitas program. Dengan demikian, diharapkan KIP dapat lebih optimal dalam mendukung pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan, Distribusi, Kartu Indonesia Pintar, Implementasi, Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi seorang manusia untuk dapat berkembang dan meningkatkan kemampuan diri. Pada zaman ini pendidikan merupakan hal yang terutama bagi seseorang apabila ingin memperoleh pekerjaan. Tingkat pendidikan yang rendah akan menghasilkan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, hal ini mengakibatkan angka pengangguran akan semakin meningkat dan kualitas hidup masyarakat menurun. Tingginya tingkat pengangguran dapat mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan dan tingkat pendidikan saling terkait, dengan hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Sering kali, orang menganggap bahwa pendidikan yang rendah identik dengan kemiskinan (Ali dkk, 2023).

Kemiskinan merupakan isu utama yang perlu segera diatasi oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa tujuan pembentukan pemerintah adalah untuk melindungi seluruh rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh warganya dan menghilangkan

kemiskinan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Kemiskinan dan pendidikan saling terkait erat dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, sementara pendidikan berfungsi untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat pemerataan pendidikan di Indonesia, menjadikannya sebagai isu penting dalam sektor pendidikan. Kesempatan bagi warga miskin untuk mendapatkan pendidikan masih belum merata, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

Masalah pembiayaan pendidikan merupakan isu penting yang harus diperhatikan, terutama bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Pendidikan diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk kemajuan bangsa di masa depan dan sangat krusial dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pendidikan menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan, karena ia merupakan faktor penentu bagi suatu bangsa untuk dapat bersaing secara global. (Ali dkk, 2023).

Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dalam mengakses pendidikan tinggi. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik namun mengalami keterbatasan ekonomi. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan untuk memberikan bantuan kepada 200.000 mahasiswa melalui program ini. Namun realitanya distribusi KIP-K tidak merata dan masih tidak tepat sasaran. Peneliti menemukan banyak fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan mengenai hal ini. Beberapa faktor yang menyebabkan fenomena-fenomena ini bisa terjadi yakni karena perbedaan geografis yang ada di Indonesia, pengaruh kekuasaan, dan kurangnya fasilitas pendidikan di beberapa daerah (Natasya, 2023).

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah dilakukan, namun masih terdapat masalah kecemburuan sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa siswa dari keluarga mampu juga terdaftar sebagai penerima dana KIP, sementara masih ada siswa yang tergolong tidak mampu tetapi tidak terdaftar untuk menerima bantuan tersebut. Situasi ini

terjadi akibat adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan pihak-pihak tertentu.

Dalam konteks ini, artikel ini akan mengkaji ketimpangan distribusi Kartu Indonesia Pintar sebagai sebuah fenomena yang mempengaruhi akses dan implementasi program tersebut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan distribusi KIP serta dampaknya terhadap siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Dengan memahami masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas program KIP dan memastikan bahwa bantuan pendidikan dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia serta menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan pendidikan di masa depan. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terhalang oleh faktor ekonomi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, untuk mengeksplorasi dan memahami ketimpangan dalam distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta dampaknya terhadap akses dan implementasi KIP yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia. Studi ini berfokus pada wilayah, seperti daerah dengan tingkat penerima manfaat tinggi, rendah, serta daerah terpencil yang menghadapi kendala akses geografis maupun administratif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi ketimpangan tersebut, baik dari sudut pandang kebijakan, operasional, maupun pengalaman penerima manfaat. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi berbagai pemangku kepentingan terkait implementasi KIP. Pendekatan kualitatif menawarkan berbagai metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis teks, dan analisis konten.

Menurut Moleong Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Rohaeni & Saryono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau disebut juga Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program perdana pemerintah Jokowi yang merupakan bagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk bersekolah. KIP merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya (usia 7-18 tahun) secara gratis. Penerima KIP diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah agar angka putus sekolah bisa turun drastis.

Untuk merespon permasalahan pendidikan di Indonesia, pemerintah berusaha untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat agar bisa mengakses pendidikan. Salah satu program yang diberikan pemerintah melalui Instruksi presiden No. 7 tahun 2014 ialah Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu. PIP ini merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskn (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA, dan siswa yang belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumah tangga atau keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional. Kemudian berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan uang tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluaraga pemegang Kartu Keluarga sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).Penerapan program Indonesia Pintar memiliki payung hukum yaitu pasal 34 ayat (1) dan (3) UUD 1945, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengatur tentang realisasi janji – janji presiden saat kampanye untuk memberikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat , serta Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program

simpanan keluarga sejahtera, program indonesia pintar, dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif.

Kartu Indonesia Pintar ini diberikan keseluruh provinsi di Indonesia, sesuai dari penyedia jasa pengiriman Kartu Indonesia Pintar. Setiap daerah mendata semua masyarakat untuk mengikuti penyeleksian kriteria KIP guna mendapatkan masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan untuk akses pendidikan. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari Petunjuk Teknis Program Bantuan Siswa Miskin/ Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun 2015 rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya perlengkapan sekolah atau transportasi siswa pergi ke sekolah. Adapun besaran dana KIP setiap jenjang pendidikan berbeda, SD/MI/Diniyah formal, pondok pesantren dan kejar paket A /PPS wajar pendidikan dasar sebesar Rp. 400.000,- untuk SMP/MTs/ SMPTK, podok pesantren, kejar paket B sebesar Rp. 500.000,- dan untuk SMA/SMK/MASMTK/SMAK. Pondok pesantren, dan kejar paket C/ Lembaga Pelatihan/ kursus sebesar Rp. 700.000,- (Uriyalita, dkk, 2020:181). Bantuan tersebut dapat diperoleh calon penerima dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015 yaitu anak berusia 6 tahun sampai 21 tahun dengan kriteria sebagai berikut :

1. Siswa atau anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Siswa atau anak dari keuarga Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Siswa atau anak yang berstatus yatim/piatu atau yatim piatu dari pantai sosial / pantai asuhan.
4. Siswa yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah.
5. Siswa yang putus sekolah akibat biaya.
6. Siswa yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam
7. Siswa dari keluarga miskin atau renta miskin yang terancam putus sekolah.

Penyaluran manfaat Program ini dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu periode Januari-Juni yang dapat dicairkan mulai bulan Januari, dan periode Juli – Desember untuk semester I yang dapat dicairkan mulai bulan Juli. Dengan penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dua kali dalam setahun diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop-out) karena tidak

tersedianya biaya. Selain itu, Program Indonesia Pintar juga diberikan untuk memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang berada pada periode transisi (antarjenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari MI/SD ke MTs/SMP atau dari MTs/SMP ke MA/SMA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.



Gambar:11 Penyaluran BOS dan PIP: Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia 2022-2024. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/penyaluran-bos-dan-pip-tingkatkan-kualitas-pendidikan-indonesia

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejak 2009, pemerintah memenuhi mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pada tahun 2024, kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan antara lain untuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk program beasiswa afirmasi, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain itu, pada tahun ini, kebijakan pembangunan pendidikan juga diarahkan antara lain untuk percepatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja, serta peningkatan investasi di bidang pendidikan. Jumlah alokasi anggaran pendidikan dalam APBN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, APBN

menganggarkan Rp473,7 triliun untuk pendidikan. Pada tahun 2021, angka tersebut bertambah menjadi Rp479,6 triliun. Kemudian, pada tahun 2022, angka tersebut kembali bertambah menjadi Rp480,3 triliun. Dalam outlook 2023, alokasi anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp552,1 triliun. Sementara itu, pada tahun 2024 ini, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp665 triliun.

Hasil wawancara dengan salah satu penerima manfaat KIp, seorang siswa bernama edi, memberikan informasi mendalam tentang implementasi program ini di tingkat sekolah SMA. Edi telah menjadi penerima manfaat sejak tahun 2010. Sebagai seorang ibu edi dengan tiga saudara kandungnya, ia mengungkapkan bahwa bantuan yang diterima telah membantu meringankan beban ekonomi keluarganya , terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan .Ia menyebutkan bahwa ia yang masih bersekolah di SMA menerima bantuan Rp1,5 juta per tahun, sedangkan adiknya yang masih di SD menerima Rp450 ribu per tiga bulan. Dana ini digunakan untuk biaya sekolah seperti pembelian seragam, buku, dan perlengkapan lainnya, serta kebutuhan sehari-hari.

Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Adi dalam pelaksanaan program ini. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan pencairan dana, yang sering kali membuat perencanaan pembayaran SPP menjadi sulit. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tidak ada pendapingan atau pengarahan khusus dari pihak terkait tentang cara memanfaatkan dana bantuan untuk kegiatan yang lebih produktif. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek pendampingan yang seharusnya menjadi bagian penting dari KIP, sesuai dengan pedoman pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (2015). Kendala lain yang diungkapkan adalah masalah ketidaktepatan sasaran. edi menyebutkan bahwa ada beberapa kasus di mana penerima manfaat KIP tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar dalam program ini. Masalah ini mencerminkan perlunya peningkatan dalam mekanisme pendataan dan verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa meskipun bantuan KIP membantu meringankan beban ekonomi dalam bidang pendidikan, jumlah bantuan yang diberikan masih dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan. Edi menambahkan bahwa meskipun bantuan ini memberikan manfaat jangka pendek, seperti akses pendidikan dan perekonomian yang lebih baik, program ini belum sepenuhnya memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa KIP lebih berfokus pada pengentasan pendidikan, tanpa memberikan solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas "Ketimpangan Distribusi Kartu Indonesia Pintar: Sebuah Kajian terhadap Akses dan Implementasi di Indonesia" pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kaitannya dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin guna menekan angka putus sekolah. KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan memiliki payung hukum yang kuat, seperti UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2004, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014.

Meskipun program ini telah membantu banyak siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti seragam, buku, dan transportasi, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut meliputi:

1. Ketidaktepatan Sasaran: Banyak penerima manfaat KIP yang tidak memenuhi kriteria, sementara keluarga miskin yang seharusnya menerima justru tidak terdaftar.
2. Keterlambatan Pencairan Dana: Hal ini menyulitkan perencanaan keuangan keluarga, khususnya untuk pembayaran biaya pendidikan.
3. Kurangnya Pendampingan: Tidak ada pengarahan khusus kepada penerima manfaat tentang cara memanfaatkan dana secara produktif.
4. Jumlah Bantuan yang Tidak Memadai: Meskipun membantu meringankan beban ekonomi, jumlah dana yang diberikan dinilai belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan.
5. Distribusi yang Tidak Merata: Perbedaan geografis dan kendala administratif di daerah terpencil menjadi hambatan dalam pemerataan manfaat program ini.

Dampak positif program ini adalah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mengurangi angka putus sekolah, dan memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, program ini dianggap masih memiliki dampak jangka pendek tanpa memberikan solusi berkelanjutan untuk kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Untuk meningkatkan efektivitas KIP, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pendataan dan verifikasi penerima manfaat, penyaluran dana yang lebih tepat waktu, serta pendampingan yang lebih intensif. Selain itu, pemerintah perlu memastikan program ini tidak hanya berfokus pada pengentasan pendidikan tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi keluarga penerima manfaat agar dampaknya lebih berkelanjutan.

Dengan upaya perbaikan tersebut, diharapkan KIP dapat lebih efektif dalam mendukung pemerataan pendidikan dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Antartila, R. A. (2019). Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Miskin di Indonesia. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global, 4(1), 1–12.

Diky Pramudita, Y. A. (2023). Sentiment Analysis of the Indonesian Smart College Card Program on Social Media X Using the Naive Bayes Algorithm. MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science, 1420-1421.

Felixianus Ali, A. M. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KELURAHAN KEPUTRAN SURABAYA (INPRES NOMOR 7 TAHUN 2014). SMIA – Edisi Khusus Tema Pelayanan Publik, 952-953.

L. E. Wahyudi et al. (2022). Mengukur Kualitas Pendidikan di Indonesia. vol. 1, no. 1, pp. 18–2.. DOI : https://jurnal.maarifnumalang.id.

Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, *2*(1), 193–204.

N. Eni Rohaeni, Oyon Saryono. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. Indonesian Journal Of Education Management & Administration Review Vol 2, No 1. https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/download/1824/1501

Nurokhmah. (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan. Jurnal Paradigma Vol 2 No 1. https://jurnal.ugm.ac.id/paradigma/article/download/66256/pdf

https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/penyaluran-bos-dan-pip-tingkatkan-kualitas-pendidikan-indonesia